

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

II.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, berada pada pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, terletak diantara $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan. Dengan luas $373,70 \text{ KM}^2$, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2 – 15 %, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%).

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 23° C sampai dengan 34° C , dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Kota Semarang dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada kaki bukit Gunung Ungaran, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Kali Besole, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Siangker, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali Garang, Kali Candi, Kali Bajak, Kali Kedungmundu, Kali Penggaron. Sebagai Daerah Hilir, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debiet air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik kontur wilayah berbukit dengan perbedaan ketinggian yang sangat curam sehingga curah hujan yang terjadi di daerah hulu akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir .

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Tambak, Hutan, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya

dengan sebaran Perumahan sebesar 33,70 %, Tegalan sebesar 15,77 %, Kebun campuran sebesar 13,47 %, Sawah sebesar 12,96 %, Penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 8,25 %, Tambak sebesar 6,96 %, Hutan sebesar 3,69 %, Perusahaan 2,42 %, Jasa sebesar 1,52 % dan Industri sebesar 1,26 %.

Sebagaimana diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 - 2010, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya.

Prioritas pengembangan wilayah Kota Semarang terbagi dalam empat wilayah pengembangan dan masing-masing dibagi dalam beberapa bagian wilayah kota, dan masing-masing bagian wilayah kota mempunyai skala prioritas pengembangan. Prioritas pengembangan itu meliputi: perdagangan, perkantoran, jasa, pendidikan, olahraga, transportasi, industri, pemukiman, pertanian, dan pengembangan Kota Baru di wilayah Kecamatan Mijen.

1. Kawasan Pusat Perkantoran

Kawasan pusat perkantoran dialokasikan dalam lima kawasan, yaitu:

- Kawasan Perkantoran Jalan Pahlawan: Pusat perkantoran Pemerintah Provinsi.
- Kawasan Perkantoran Jalan Pemuda: Pusat perkantoran Pemerintah Kota Semarang.
- Kawasan Perkantoran Jalan Madukoro: Pusat perkantoran Pemerintah Provinsi dan Kota Semarang.
- Kawasan Kota Lama: Kawasan perkantoran swasta.
- Kawasan Kota Baru Mijen: Pusat perkantoran swasta, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Semarang.

2. Kawasan Perdagangan

Kota Semarang dalam mengembangkan kawasan perdagangan lebih menekankan pada:

- Pengoptimalan pusat-pusat perdagangan yang sudah ada di wilayah pusat kota, dan pengembangan pusat perdagangan baru di semua wilayah kecamatan .
- Pengembangan pusat perdagangan yang bersifat Linear, yaitu pusat perdagangan di sepanjang jalan dan bersifat alamiah, misalnya Jl MT Haryono, Jl Dr Cipto, Jl Brigjen Sudiarto, Jl Jend Sudirman, Jl Pandanaran, Jl Ahmad Yani, Jl Gajah Mada, dan Jl MH Thamrin.

3. Kawasan Industri

Kawasan industri di Kota Semarang yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan terbagi dalam tiga wilayah industri (*Industry estate*), yaitu:

a. Kawasan Industri Genuk

Kawasan industri Genuk mempunyai kelebihan sebagai berikut:

- Luas areal 900 ha
- Dekat dengan pelabuhan laut, pergudangan, dan pusat perdagangan
- Dekat dengan sumber tenaga kerja
- Dekat dengan jalan transportasi Jakarta-Surabaya
- Angin tidak menuju ke Pusat Kota
- Drainase ke arah laut

b. Kawasan Industri Tugu

- Kelebihan Kawasan Industri Tugu
- Luas areal 1600 ha
- Dekat dengan sumber tenaga kerja
- Dekat dengan jalan transportasi Jakarta-Surabaya
- Jalur sabuk pengembangan Jawa Tengah Bagian Utara
- Drainase ke arah laut
- Memungkinkan pembangunan pelabuhan industri
- Kondisi tanahnya lebih matang daripada Kawasan Industri Genuk.

c. Kawasan Industri Mijen

Kawasan Industri Mijen merupakan satu kesatuan dengan pembangunan Kota Baru Mijen. Kawasan ini merupakan wilayah cadangan dan mampu menjadi kawasan industri, karena:

- Luas areal 300 ha
- Memungkinkan jalur ke Pelabuhan Laut Tanjung Emas
- Jenis industri yang menjadi prioritas adalah industri dengan tingkat polusi rendah dan teknologi tinggi.
- Memungkinkan pengembangan jalur transportasi primer.

d. Kawasan Pendidikan dan Olah raga

- Kawasan pendidikan di kota Semarang, khususnya untuk pendidikan tinggi, diarahkan kearah Kecamatan Ngaliyan, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati dan Mijen.
- Kawasan olah raga di Kota Semarang, untuk skala regional diarahkan pada dua daerah utama, yaitu Kecamatan Gajahmungkur dan kawasan kota baru di Kecamatan Mijen.

Masing-masing bagian wilayah kota mempunyai prioritas peruntukan pengembangan.

Tabel II.1

Pembagian Wilayah Pengembangan Kota Semarang

No	Wilayah Pengembangan	Bagian Wilayah Kota	Prioritas Peruntukan
1	Wilayah Pengembangan Kota I	1. Bagian wilayah kota I: Kec Semarang Tengah, Kec Semarang Timur, Kec Semarang Selatan	Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa
		2. Bagian wilayah kota II: Kec Gajah Mungkur, Kec Candisari	Pendidikan dan Olah raga
		3. Bagian wilayah kota III: Kec Semarang Barat dan Kec Semarang Utara	Transportasi
2	Wilayah Pengembangan Kota II	1. Bagian Wilayah Kota IV: Wilayah Genuk	Sub urban, wilayah Industri, transportasi
		2. Bagian Wilayah Kota X: Wilayah Kec Tugu dan Kec Ngaliyan	Sub Urban, wilayah industri, dan perumahan dengan kepadatan rendah
3	Wilayah Pengembangan Kota III	1. Bagian Wilayah Kota V: Kec Gayamsari dan Kec Pedurungan	Pemukiman dan Pendidikan
		2. Bagian Wilayah Kota VI: Kec Tembalang	Pendidikan dan Pemukiman
		3. Bagian Wilayah Kota VII: Kec Banyumanik	Militer dan Pemukiman
4	Wilayah Pengembangan Kota IV	1. Bagian Wilayah Kota VIII- Kec Gunung Pati	Wilayah cadangan pengembangan pendidikan dan pengembangan sektor pertanian, meliputi: perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan darat

No	Wilayah Pengembangan	Bagian Wilayah Kota	Prioritas Peruntukan
		2. Bagian Wilayah Kota IX- Kec Mijen	Wilayah cadangan pengembangan: Kawasan pertumbuhan baru sebagai kota baru; Industri non polutif dan teknologi tinggi, rekreasi, dan olah raga: Pengembangan sektor pertanian yang meliputi; perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan darat

Sumber: RTRW Kota Semarang 2000-2010

Penentuan wilayah pengembangan disesuaikan dengan spesifikasi kegiatan yang ada dan potensi lokasi serta karakteristik kegiatan yang akan dikembangkan pada masing-masing wilayah. Kemudian untuk lebih meningkatkan efisiensi pengembangan kota, maka masing-masing wilayah pengembangan dibagi ke dalam BWK (Bagian Wilayah Kota). Adapun pembagian wilayah-wilayah Kota sesuai dengan RTRW Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Bagian Wilayah Kota I

Rencana pemanfaatan ruang di BWK I sesuai dengan arahan dari RTRW Kota Semarang serta kecenderungan perkembangan yang ada adalah :

- a. *Kawasan Perkantoran*, alokasi kawasan perkantoran di BWK I meliputi Kelurahan Sekayu, Kelurahan Mugasari dan Kelurahan Pleburan.
- b. *Kawasan Perdagangan dan Jasa*, alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan Pandansari, Kauman, Jagalan, Rejomulyo, Peterongan dan Purwodinatan.
- c. *Kawasan Permukiman*, alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan Pindrikan Lor, Pindrikan Kidul, Miroto, Pekunden, Gabahan, Brumbungan, Mlatibaru, Bugangan, Sarirejo, Rejosari, Karangturi, Karang Tempel, Bulustalan, Barusari, Randusari, Lamper Lor, Lamper Kidul dan Lamper Tengah.
- d. *Kawasan Campuran* (permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum), alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan Kembangsari, Bangunharjo, Karangkidul, Kemijen, Mlatiharjo, Kebonagung, Randusari, Mugassari, Pleburan dan Wonodri.

2. Bagian Wilayah Kota II

Rencana pemanfaatan ruang BWK II berdasarkan kepada kondisi fisik dasar serta fungsi dan peranan bagian wilayah kota sesuai dengan

arahan dari RTRW Kota Semarang. Berdasarkan hal tersebut maka arah pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan adalah :

- a. *Kawasan Permukiman Perkotaan*, alokasi pengembangan fungsi tersebut meliputi Kelurahan Bendungan, Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Duwur, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Jomblang, Kelurahan Kaliwiru, Kelurahan Jatingaleh, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kelurahan Lempongsari, Kelurahan Bendan Ngisor, Kelurahan Gajah Mungkur, Kelurahan Sampangan, Kelurahan Wonotingal, Kelurahan Candi, dan Kelurahan Tegalsari.
- b. *Kawasan Perkantoran*, alokasi pengembangan fungsi perkantoran Kelurahan Petompon, Kaliwiru, Karangrejo, Wonotingal, Tegalsari, dan Jatingaleh.
- c. *Kawasan Perdagangan Barang dan Jasa*, pada BWK II fungsi ini berkembang di sepanjang jalur utama dengan skala pelayanan kota untuk melayani pemukiman-pemukiman yang tumbuh dan berkembang. Beberapa kelurahan yang dialokasikan menjadi fungsi perdagangan dan jasa meliputi Kelurahan Wonotingal, Kelurahan Jatingaleh dan Kelurahan Gajah Mungkur.
- d. *Kawasan Campuran Permukiman dan Perdagangan*, alokasi pengembangan fungsi ini berada pada kelurahan Sampangan, Wonotingal, Jomblang, Petompon, Tegalsari.
- e. *Fungsi Kawasan Khusus Militer*, alokasi pengembangan fungsi ini berada pada Kelurahan Gajah Mungkur.
- f. *Kawasan Olahraga dan Rekreasi*, alokasi pengembangan fungsi ini pada Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Kaliwiru.
- g. *Kawasan-kawasan pendidikan*, pada perkembangannya fasilitas pendidikan ini diharapkan tetap memiliki fungsi pelayanan seperti kondisi sekarang dengan pembatasan pengembangan pada Kelurahan Bendan Duwur. Pengembangan fungsi ini diarahkan pada Kelurahan Sampangan dan Kelurahan Petompon, Kelurahan Gajah Mungkur, Kelurahan Jatingaleh, dan Kelurahan Karangrejo.

3. Bagian Wilayah Kota III

Peran BWK III sebagai kawasan pengembangan dengan fungsi utama sebagai Kawasan Permukiman, kawasan Pusat Kota dan Pusat Transportasi Kota yang ditunjang dengan berbagai fungsi pendukung yaitu Fungsi Pelayanan Umum. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di BWK III meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. *Pusat transportasi*, Pengembangan fungsi kegiatan harus dibentuk dalam satu kesatuan sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan wilayah Kota Semarang dan regional Jawa Tengah dengan wilayah nasional maupun internasional. Ketiga roda transportasi sebagai pusat kegiatan transportasi masing-masing Bandar Udara Ahmad Yani berada pada Kelurahan Tambakharjo, Pelabuhan Samudra berada di Kelurahan Tanjung Mas, dan Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol di Kelurahan Dadapsari dan Purwosari.
- b. *Permukiman dan Perumahan*, Pembangunan perumahan di BWK III diarahkan sebagai permukiman dengan intensitas yang cukup tinggi yang meliputi semua Kelurahan yang berada pada BWK II.
- c. *Kawasan Rekreasi*, yang terdiri dari kawasan rekreasi pameran PRPP yang berskala Regional Jawa Tengah, museum terbesar di Jawa Tengah (Museum Ronggowarsito), Kawasan rekreasi pantai Marina dan Kuil suci untuk perayaan tahun baru Cina.
- d. *Kawasan Pergudangan*, kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan fungsi utama BWK III meliputi Kelurahan Tanjung Mas dan Bandarharjo yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang yang datang melalui pelabuhan samudra.
- e. *Perdagangan dan jasa*, fungsi perdagangan dan jasa di BWK III yaitu perdagangan hasil bumi, onderdil mobil dan motor, bahan bangunan, elektronika dan lain-lain. Melihat kecenderungan perkembangan aktivitas wilayah BWK III maka arahan pengembangan fungsi kegiatan ini mencakup seluruh kelurahan dengan pusat di Kelurahan Karangayu.
- f. *Perkantoran/Pemerintahan dan Fasilitas Sosial*, arahan pengembangan fungsi kegiatan ini dialokasikan pada Kelurahan Tanjung Mas dan Kelurahan Tawang Sari.
- g. *Industri*, arahan pengembangan fungsi ini di BWK III dialokasikan pada Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas.
- h. *Penghijauan dan Ruang Terbuka*, diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai paru-paru kota dengan mengupayakan suatu taman-taman lingkungan serta jalur hijau sepanjang jalan kota.
- i. *Retarding Basin*, diarahkan untuk berfungsi sebagai tempat penampungan air karena BWK III ini terdapat masalah terhadap penggenangan air (rob dan banjir).

4. Bagian Wilayah Kota IV

Sesuai dengan arahan RTRW Kota Semarang bahwa fungsi primer BWK IV ditetapkan untuk kegiatan industri, pusat transportasi dan perikanan darat. Sedangkan kegiatan fungsi pendukung fungsi primer yang ada yaitu kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, pusat kesehatan dan pendidikan. Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah :

- a. *Kawasan Industri*, dialokasikan di sebelah utara dan selatan Jl. Kaligawe. Untuk industri kecil di selatan yaitu di Kelurahan Muktiharjo Lor, Gebangsari, Genuksari, dan Banjardowo. Sedangkan industri sedang dan besar di utara, yaitu pada kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo.
- b. *Kawasan Permukiman*, dialokasikan sebelah selatan dan timur Kecamatan Genuk yaitu di Kelurahan Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Sembungharjo, Banjardowo, Karangroto, sebagian Kudu, sebagian Muktiharjo Lor, sebagian Genuksari, Gebangsari, dan Penggaron Lor.
- c. *Kawasan Perdagangan dan Jasa*, dialokasikan disepanjang Kaligawe – Genuk dan sepanjang jalan Banjardowo Raya (Genuk-Pedurungan).
- d. *Kawasan Perikanan Darat*, kegiatan perikanan yang dikembangkan di BWK IV Genuk adalah perikanan tambak. Lahan untuk kegiatan ini dialokasikan disebelah utara Kecamatan Genuk yaitu di Kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo.
- e. *Kawasan Permukiman Nelayan dan Perumahan bagi Pekerja Pabrik*, yang dialokasikan di Kelurahan Trimulyo untuk permukiman Nelayan dan Kelurahan Terboyo Kulon dan Wetan untuk perumahan bagi pekerja pabrik.
- f. *Pusat Transportasi*, yaitu dengan adanya Terminal Terboyo yang berada di Kelurahan Terboyo Kulon.
- g. *Kawasan Pendidikan dan Kesehatan*, diarahkan di Kelurahan Terboyo Kulon dan tersebar merata diseluruh wilayah Kecamatan Genuk.

5. Bagian Wilayah Kota V

Sesuai dengan arahan RTRW Semarang bahwa fungsi primer BWK V ditetapkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pusat transportasi,

kawasan permukiman dengan kepadatan sedang – tinggi. Sedangkan kegiatan fungsi pendukung fungsi primer yang ada yaitu sebagai pusat kesehatan dan kawasan industri. Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah :

- a. *Kawasan Perdagangan dan Jasa* : dialokasikan disepanjang jalan Brigjen Sudiarto (Jl. Majapahit), Jl. Supriyadi dan sebagian Jalan Kaligawe Raya, sedangkan kawasan campuran permukiman dan perdagangan disepanjang Jalan Gajah, Arteri Pedurungan – Citarum, Bandardowo Raya dan Pedurungan Kidul.
- b. *Kawasan Permukiman* : dialokasikan secara merata diseluruh bagian wilayah Kecamatan Gayamsari dan Pedurungan yaitu Kelurahan Tambakrejo, Kaligawe, Sawahbesar, Sambirejo, Siwalan, Pedurungan Tengah, Padean Lamper, Gayamsari, Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, Kalicari, Palebon, Gemah, Tlogosari Wetan, Penggaron Kidul, Pedurungan Lor, Plamongansari dan Tlogomulyo.
- c. *Kawasan Industri* : dialokasikan di Timur BWK V (dekat perbatasan dengan Kecamatan Mranggen – Demak), yaitu di Kelurahan Plamongansari dan bagian utara BWK V, yaitu di Kelurahan Tambakrejo.
- d. *Pusat Transportasi* : yaitu dengan adanya Sub Terminal Penggaron di Kelurahan Penggaron Kidul.
- e. *Pusat Kesehatan* : diarahkan di Kelurahan Gemah dengan adanya Rumah Sakit Jiwa Semarang, sedangkan fasilitas kesehatan lainnya tersebar diseluruh bagian wilayah Kecamatan Gayamsari dan Pedurungan.

6. Bagian Wilayah Kota VI

Sesuai dengan arahan RTRW Semarang bahwa fungsi primer BWK VI ditetapkan untuk kegiatan pendidikan, fungsi skunder (skala kota) sebagai kawasan permukiman (kepadatan sedang-rendah). Sedangkan kegiatan pendukung lainnya (skala lokal) meliputi kegiatan campuran, perdagangan dan jasa, rekreasi dan konservasi (penanganan daerah lindung). Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah :

- a. *Kawasan Pendidikan* : dialokasikan di Kelurahan Tembalang dan di Perumahan Bukit Kencana Jaya. Universitas Diponegoro merupakan sarana pendidikan skala nasional yang ada di Kelurahan Tembalang. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pendidikan memerlukan kebutuhan ruang pelengkap sarana prasarana

pendidikan, seperti jaringan jalan untuk kemudahan akses transportasi (terutama untuk menjangkau lokasi-lokasi kampus yang selama ini dilayani oleh angkutan plat hitam).

- b. *Kawasan Perumahan* : dialokasikan di semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang dengan tingkat kepadatan penduduk rendah – sedang. Kecamatan Tembalang dalam konstelasi regional merupakan salah satu kawasan pemekaran kota dengan kondisi topografi perbukitan guna meringankan tekanan penduduk di pusat Kota Semarang. Lokasi perumahan bertipe mengelompok dan tidak teratur. Tipe mengelompok terdapat di perumahan baru yang dibangun *developer*, misalnya Sendangmulyo dan Bukit Kencana Jaya. Sedangkan tipe perumahan yang tidak teratur terdapat di permukiman penduduk lokal/tradisional (Meteseh dan Mangunharjo). Pengaturan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan orientasi dan peletakan masa bangunan perumahan untuk mencapai kepadatan yang sesuai arahan RTRW (kepadatan rendah – sedang) dilakukan dengan memberikan batasan mengenai KDB/KLB yang ditetapkan (Untuk perumahan skala besar/real estate).
- c. *Kawasan Rekreasi* : kawasan rekreasi di Kelurahan Rowosari berupa danau buatan dengan memanfaatkan daerah genangan. Skala pelayanan rekreasi ini adalah skala kota.
- d. *Kawasan Campuran* : terletak disepanjang jalur utama (Jalan Mrican/sekitar Kampus Undip), di Kelurahan Kedungmundu, Sendangguwo, Sendangmulyo, Mangunharjo, Bulusan, Tandang dan Sambiroto. Kawasan campuran terdiri dari kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa.
- e. *Kawasan Perdagangan dan Jasa* : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK VI dialokasikan di sekitar Kelurahan Tembalang, Kedungmundu, Sendangguwo, Sendangmulyo dan di Perumahan Bukit Kencana Jaya. Kebutuhan ruang untuk mewadahi aktivitas perdagangan dan jasa ini terutama untuk memenuhi permintaan akibat adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang, dan karena adanya permintaan kebutuhan sehari-hari penduduk. Pola ini membawa pada satu pemikiran bahwa kegiatan

perdagangan dan jasa yang ada di Kecamatan Tembalang berskala lokal.

- f. *Kawasan Konservasi* : Kawasan konservasi terletak di Kelurahan Bulusan, Meteseh, Mangunharjo dan Sambiroto. Kawasan konservasi terutama dialokasikan di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kelerengan > 40%.

7. Bagian Wilayah Kota VII

Sesuai dengan arahan di RTRW, BWK VII mempunyai fungsi sekunder (skala kota) untuk kegiatan permukiman (kepadatan sedang-rendah), transportasi dan rekreasi. Sedangkan kegiatan pendukung fungsi sekunder meliputi kegiatan pendidikan campuran dan kegiatan perdagangan dan jasa. Selain itu BWK VII juga mempunyai fungsi khusus, yaitu sebagai kawasan khusus militer. Adapun arahan lokasi untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah:

- a. *Kawasan Permukiman* : dialokasikan disemua kelurahan dengan kepadatan rendah-sedang untuk menampung limbah penduduk dari pusat Kota Semarang. Timbulnya permukiman baru yang dibangun oleh *developer* seperti Villa Aster, Srdol Bumi Indah, Perumahan Setiabudi dan Graha Estetika adalah indikasi fungsi utama kawasan ini dan merupakan kecenderungan perkembangan kawasan untuk fungsi permukiman. Disamping itu perkembangan perumahan Banyumanik merupakan potensi lokasi perumahan yang akan menjadi pusat perkembangan aktivitas lainnya yang ada di Kecamatan Banyumanik. Perkembangan fungsi permukiman yang dibangun oleh *developer* lebih dapat dikontrol dengan mekanisme peraturan yang berlaku (penetapan KDB/KLB) daripada pengaturan rumah-rumah tradisional penduduk lokal yang cenderung tidak teratur baik mengenai luasan persil, orientasi dan peletakan masa bangunan.
- b. *Kawasan Transportasi* : Kawasan transportasi terutama disebabkan karena adanya jalan-jalan regional yang melewati kawasan Banyumanik, seperti Jalan Tol Jatingaleh-Srdol. Disamping itu kawasan Banyumanik adalah *entrance point* (pintu gerbang) Kota Semarang dari arah selatan. Keberadaan tersebut dari aspek transportasi perlu direspon dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang cukup. Disamping itu pengaturan tata guna lahan

di sekitar jalan-jalan utama dari aspek estetika perlu diperhatikan karena akan terkait dengan image Kota Semarang.

- c. *Kawasan Rekreasi* : Kawasan rekreasi berupa Taman Tabanas dan sekitarnya (panorama Kota Semarang dari atas). Skala pelayanan rekreasi ini adalah skala kota.
- d. *Kawasan Pendidikan* : di Kelurahan Pedalangan (Akper), terutama untuk mengimbangi perkembangan Kampus Undip di Kelurahan Tembalang.
- e. *Kawasan Campuran*: meliputi kegiatan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Tinjomoyo, Ngesrep, Srandol Kulon, Srandol Wetan, Sumurboto, Banyumanik dan Pudak Payung.
- f. *Kawasan Perdagangan dan Jasa* : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana system jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK VII dilokasikan di Kelurahan Tinjomoyo, Ngesrep, Srandol Wetan, dan Banyumanik.
- g. *Kawasan Khusus Militer*: terletak di Kelurahan Srandol Kulon dan Pudak Payung.

8. Bagian Wilayah Kota VIII

Sesuai dengan arahan di RTRW bahwa fungsi primer BWK VIII ditetapkan untuk kegiatan pertanian dan konservasi serta pendidikan. Sedangkan kegiatan pendukung fungsi primer tersebut adalah kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, dan pariwisata. Adapun kebijaksanaan pengembangan wilayah BWK VIII adalah:

- a. *Kawasan Permukiman* : Kawasan permukiman pedesaan dialokasikan di seluruh wilayah lingkungan pedesaan, sedangkan kawasan permukiman perkotaan dialokasikan disekitar pusat BWK VIII Kelurahan Gunungpati dan di Kelurahan Sekaran.
- b. *Kawasan Perdagangan dan Jasa* : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas an rencana jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK VIII dialokasikan di Kelurahan Gunungpati dan Sekaran.
- c. *Kawasan Campuran Permukiman, Perdagangan dan Jasa* : diarahkan disepanjang jalan Gunungpati-Ungaran (di Kelurahan

Gunungpati, Plalangan, dan Sumurrejo), dan disekitar jalan Gunungpati-Manyaran di Kelurahan Gunungpati dan Cepoko.

- d. *Kawasan Pendidikan* : dialokasikan di Kelurahan Sekaran dan Nongkosawit
- e. *Kawasan Pertanian*: direncanakan diseluruh BWK VIII. Di bagian tengah dan selatan untuk pertanian lahan basah, dan dibagian utara untuk pertanian lahan kering.
- f. *Kawasan Rekreasi*: kegiatan rekreasi di BWK VIII berupa kawasan rekreasi waduk dan Gua Kreo di Kelurahan Kandri.
- g. *Kawasan Konservasi*: diseluruh wilayah yang memiliki syarat sebagai kawasan konservasi, yaitu disekitar sungai, waduk, mata air dan lahan dengan kelerengan lebih dari 40%.

9. Bagian Wilayah Kota IX

Pemanfaatan ruang BWK IX direncanakan dengan mempertimbangkan:

- a. BWK IX Mijen merupakan wilayah cadangan pengembangan kota yang berperan sebagai pusat pelayanan dengan skala regional.
- b. BWK IX Mijen termasuk dalam kategori wilayah perbukitan yang akan diarahkan pengembangannya sesuai dengan potensi-potensi sumber daya alamnya yaitu untuk pengembangan pertanian dan konservasi, dan pemukiman.
- c. Fungsi dari BWK IX yaitu pengembangan permukiman kepadatan rendah, industri yang bertumpu sumber daya alam, agro bisnis, agrowisata dan perlindungan lingkungan

Adapun rencana pemanfaatan ruang wilayah BWK IX, yaitu:

- a. *Kawasan Permukiman*_: Kawasan permukiman pedesaan dialokasikan diseluruh wilayah lingkungan pedesaan, sedangkan kawasan permukiman perkotaan dialokasikan disekitar pusat BWK IX Mijen dan di Kelurahan Pesantren, Jatibarang dan Kedungpane.
- b. *Kawasan Perdagangan dan Jasa*: berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK IX dialokasikan di Kelurahan Wonopolo, Pesantren dan Jatibarang.
- c. *Kawasan Campuran Permukiman* : perdagangan dan jasa diarahkan disepanjang jalan Mijen-Boja (di Kelurahan Cangkiran, Jatisari, Mijen, dan Wonopolo) dan sekitar Kelurahan Polaman.
- d. *Kawasan Pendidikan*: dialokasikan di Kelurahan Jatibarang.

- e. *Kawasan Industri*: dialokasikan di sekitar jalan arteri primer di Kelurahan Jatibarang dan Mijen berupa industri bebas polusi (*techno park*).
- f. *Kawasan Pertanian*: direncanakan di bagian utara wilayah BWK IX di Kelurahan Cangkiran, Bubakan, Polaman, Purwosari, Tambangan, dan Karangmalang.
- g. *Kawasan Rekreasi*: kegiatan rekreasi di BWK IX berupa kawasan rekreasi/agrowisata Sodong di Kelurahan Purwosari.
- h. *Kawasan Konservasi*: diarahkan di seluruh wilayah yang memiliki syarat sebagai kawasan konservasi, yaitu di sekitar sungai, waduk dan lahan dengan kelerengan lebih dari 40%.

10. Bagian Wilayah Kota X

Sesuai dengan arahan di RTRW bahwa fungsi primer BWK X ditetapkan untuk kegiatan industri, sedangkan kegiatan pendukung fungsi primer tersebut adalah kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, pertanian, rekreasi, perikanan dan olah raga. Adapun arahan lokasi untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah:

- a. *Kawasan Industri* : dialokasikan disebelah utara jalan kereta api dan sebelah selatan Jalan Siliwangi.
- b. *Lokasi industri* yang terletak di sebelah Utara jalan kereta api terdapat di Kelurahan Mangkang Wetan, Randusari, Karanganyar dan Tugurejo. Sedangkan yang terdapat di sebelah Selatan Jalan Siliwangi terdapat di Kelurahan Podorejo, Rowosari, Tambakaji dan Purwoyoso.
- c. *Kawasan Permukiman*: dialokasikan sebagian besar terdapat di Kecamatan Ngaliyan. Kawasan akan dikembangkan sebagai kegiatan perumahan/permukiman terdapat di Kelurahan Ngaliyan, Tambak aji, Bringin, Gondoriyo, Podorejo dan Kelurahan Tugurejo.
- d. *Kawasan Perdagangan dan Jasa*: berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK X dilokasikan di Mangkang, Tambakaji dan Jarakah khususnya di sepanjang Jalan Siliwangi.
- e. *Kawasan Campuran Perumahan, Perdagangan dan Jasa*: diarahkan di sepanjang Jalan Siliwangi (terutama di Kelurahan Mangkang Kulon, Wonosari), Ngaliyan-Boja, Jalan Gatot Subroto dan disepanjang rencana jalan lingkaran luar (*outer ring road*). Untuk

kawasan campuran permukiman dan industri diarahkan di Kelurahan Karanganyar dan Tugurejo.

- f. *Kawasan Pendidikan*: diarahkan di Kelurahan Tambak aji terutama di dekat pertigaan Jrasah.
- g. *Kawasan Pertanian*: direncanakan di kawasan Utara Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo.
- h. *Kawasan Rekreasi*: kegiatan rekreasi di BWK X berupa kawasan rekreasi pantai, kawasan ini terdapat di bagian Utara Kecamatan Tugu.
- i. *Kawasan Perikanan*: kegiatan perikanan yang dikembangkan di BWK X adalah perikanan tambak. Lahan untuk kegiatan ini dialokasikan dibagian Utara Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo.
- j. *Kawasan Olah Raga*: dialokasikan di Kecamatan Bambankerep terutama di dekat perbatasan dengan Kecamatan Mijen.

II.2. PEREKONOMIAN DAERAH

II.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di samping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi kota Semarang per tahun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Rata-rata pertumbuhan Ekonomi per tahun 2000 – 2004

No	Tahun	Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pertahun (%)
1	2000	3,40
2	2001	4,97
3	2002	5,11
4	2003	4,10
5	2004	4,02

Sumber : Semarang dalam angka 2004

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Sejak tahun 2000 pertumbuhan ekonomi merangkak naik ke angka pertumbuhan yang positif hingga mencapai angka pertumbuhan 4,02 % pada tahun 2004. Selama kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,19 % pertahun. Dengan demikian pada akhir tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang diprediksikan mencapai angka kurang lebih 5,5 %.

Pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor non migas.

II.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun mengalami peningkatan rata-rata 8,20 % per tahun. Adapun pertumbuhan sektor ekonomi Kota Semarang Tahun 2000 – 2004 menurut Lapangan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Pertumbuhan Sektor ekonomi di Kota Semarang
menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 1993
tahun 2000-2004

No	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004
1	Pertanian	-28,13	-9,66	3,37	4,25	1,86
2	Pertambangan dan Penggalian	4,94	8,41	3,72	2,72	3,60
3	Industri Pengolahan	3,10	5,61	4,30	4,16	3,38
4	Listrik, Gas dan Air Minum	3,88	3,38	10,87	5,97	8,40
5	Bangunan	6,89	6,86	3,27	3,91	2,79
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,15	4,08	4,31	4,56	4,93
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,37	8,87	3,79	5,75	5,23
8	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	7,48	2,75	2,49	4,34	2,93
9	Jasa-jasa	2,27	6,40	3,56	4,00	2,84
	PDRB Total	4,97	5,11	4,10	4,43	4,02

Sumber : PDRB Kota Semarang Tahun 2004, Bappeda dan BPS Kota Semarang

Tabel diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor pada tahun 2004 menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor Listrik mengalami pertumbuhan paling besar dibanding 8,40 %, lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 5,97 %. Peningkatan output pada sektor listrik berkaitan dengan fungsinya sebagai penyedia kebutuhan masyarakat dan perkembangannya searah dengan perkembangan penduduk dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah.

Lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2004 atas dasar harga berlaku adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 38,81%, dan seterusnya adalah Sektor Industri sebesar 29,26%, Sektor jasa-jasa 12,74 %, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 6,43%, sektor

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 5,72%, Sektor bangunan 3,89%, sektor listrik, gas, dan air sebesar 1,88%, sektor pertanian sebesar 0,94%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,34 %.

Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang sangat besar didorong oleh adanya pusat pelayanan perekonomian yang berskala regional maupun nasional. Sementara, sektor industri pengolahan, baik industri besar maupun industri sedang yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Semarang, dapat dijumpai persebarannya antara lain di Kecamatan Genuk dan Ngaliyan, dan sebagian kecil terletak di Kecamatan Tugu dan Semarang Barat; sedangkan persebaran industri sedang sebagian besar terletak di Kecamatan Genuk dan Semarang Barat dan sebagian kecil terletak di Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Utara.

Perhitungan sektor ekonomi basis dilakukan dengan penghitungan nilai LQ Kota Semarang. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan perhitungan LQ, dapat diketahui bahwa Kota Semarang mempunyai sektor basis sebagai berikut:

1. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor basis pada wilayah Kota Semarang. Hal ini didorong oleh banyaknya pelayanan keuangan dan jasa yang ada, serta kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial perekonomian dalam kawasan Kedungsepur pada khususnya dan wilayah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Tabel II.4
Nilai LQ untuk Ekonomi Basis Berdasarkan Nilai PDRB
Atas Dasar Harga Konstan di Kota Semarang

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,19	0,18	0,18	0,16
Industri Pengolahan	1,21	1,15	1,12	1,09	1,01
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,49	1,34	1,28	1,23	1,23
Bangunan	0,81	0,99	0,98	0,92	0,89
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,77	1,69	1,60	1,54	1,46
Pengangkutan dan Komunikasi	1,58	1,57	1,51	1,42	1,36
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perush.	1,89	1,88	1,82	1,73	1,68
Jasa	1,53	1,47	1,47	1,40	1,38

Sumber: Kota Semarang dalam Angka

2. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan sektor basis. Hal ini didukung oleh kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pelayanan di kawasan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah sehingga terdapat banyak fasilitas perdagangan dan jasa yang berskala luas di wilayah ini dan mampu melayani wilayah di sekitarnya.
3. Sektor jasa merupakan sektor basis yang menunjukkan bahwa perkembangan perkotaan sudah mengarah ke arah sektor ekonomi tersier.
4. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis selanjutnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pusat-pusat pelayanan komunikasi dan transportasi baik darat, laut, maupun udara di Kota Semarang. Selain itu, kedudukan Kota Semarang yang merupakan kota transit yang dilalui oleh jalur utama pergerakan Jakarta-Surabaya turut mendorong pesatnya perkembangan sektor pengangkutan di wilayah ini.
5. Sektor basis selanjutnya adalah sektor listrik, gas, dan air bersih yang menunjukkan bahwa Kota Semarang telah menjadi pusat bagi pelayanan kebutuhan listrik, gas, dan air bersih bagi wilayah sekitarnya, terutama wilayah Kedungsapur.
6. Sektor basis terakhir adalah industri pengolahan. Hal ini sangat terkait dengan banyaknya kawasan industri yang terdistribusi di wilayah Kota Semarang.

Pada Tahun 2000 pendapatan perkapita masyarakat sebesar Rp. 3.195.051,- atau mengalami pertumbuhan 3,35 %, tahun 2001 sebesar Rp. 3.297.098,- atau mengalami pertumbuhan 3,19 %, tahun 2002 sebesar Rp. 3.399.781,- atau meningkat sebesar 3,11 %, tahun 2003 sebesar Rp. 3.465.463 atau 1,93 % dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 3.602.362,- atau 3,95 %.

Peningkatan ini juga diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita dimana perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2000 sampai dengan 2004 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pendapatan perkapita atas dasar berlaku dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan, bila pada tahun 1999 adalah Rp. 8.734.259,45 dan pada tahun 2003 mencapai Rp. 14.016.235,34 berarti terjadi peningkatan sebesar 1,60 persen selama 5 tahun. Jika dilihat berdasarkan harga konstan 1993, pertumbuhan pendapatan perkapita dalam periode 1999 – 2003 juga mengalami

peningkatan sebesar 1,13 %. Selengkapnya rata-rata Produk domestik regional Bruto perkapita penduduk tahun 1999 – 2003 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Rata-rata Produk domestik regional Bruto perkapita penduduk
Tahun 2004 – 2003

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993
2000	9.923.098,00	3.959.928,10	13,61	3,55
2001	11.419.483,45	4.088.522,53	15,08	3,25
2002	12.885.457,96	4.215.832,47	12,84	3,11
2003	14.016.235,34	4.308.516,94	8,78	2,20

Sumber : Semarang Dalam Angka Diolah

Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi yang selama lima tahun terakhir terbesar adalah Perdagangan dan Hotel sebesar 35,45 % kemudian diikuti industri pengolahan 31,69 %, jasa-jasa 13,12 %, pengangkutan dan komunikasi 7,34 %, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 6,37 %, bangunan 3,60 %, listrik, gas dan air bersih 1,50 %, pertanian 0,67 % dan pertambangan dan penggalian 0,26 %.

Pertumbuhan sektor usaha perdagangan yang cukup tinggi didukung dengan adanya nilai ekspor non migas yang mengalami peningkatan cukup tajam. Data ekspor non migas selama tiga terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Nilai Ekspor Non Migas Menurut Jenis Komoditas di Kota Semarang
Tahun 2002 -2004 dalam (US \$ 000)

No	Jenis Komoditi	2002	2003	2004
1	Perkebunan	5.902,29	7.955,55	8.857,87
2	Kehutanan	6.253,68	13.246,26	14.655,22
3	Pertanian	1.075,71	2.059,94	1.495,89
4	Perikanan	1.584,25	2.716,94	1.041,86
5	Peternakan	977,86	1.346,38	1.251,27
6	Rempah-rempah	271,11	407,58	400,14
7	Makanan	1.357,54	3.725,53	2.166,53
8	Kerajinan	320,51	485,37	1.309,98
9	Perindustrian	271.445,78	369.693,39	389.769,55
	J U M L A H	289.188,72	401.636,94	420.948,26

Sumber : Semarang dalam angka 2004

II.2.3. Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan tingkat konsumsi meningkat sehingga mendorong terjadinya laju inflasi yang cukup besar, pada tahun 2000 laju inflasi sebesar 8,73 %, tahun 2001 naik menjadi 13,98 %, tahun 2002 turun menjadi 13,56 persen, pada tahun 2003 turun menjadi 6,07 % dan pada tahun 2004 sebesar 5,98 %.

Laju inflasi tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan inflasi ini terjadi disebabkan oleh deflasi kelompok bahan makanan yang mencapai minus 1,25 %, sedangkan kelompok pengeluaran konsumsi yang lainnya mengalami kenaikan.

Laju inflasi untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi tahun 2003 adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 21,63 %, kelompok perumahan sebesar 11,07 %, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 5,35 %, kelompok sandang sebesar 2,38 %, kelompok transport dan komunikasi sebesar 1,58 % dan kelompok kesehatan sebesar 1,56 %. Untuk kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar minus 1,25 %.

II.2.4. Pendapatan Daerah

Bergulirnya otonomi daerah membawa konsekuensi perubahan manajemen keuangan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Selama kurun waktu lima tahun, perhitungan anggaran pendapatan Pemerintah Kota Semarang selalu memenuhi target kecuali tahun 2000 karena adanya transisi waktu perubahan dimulainya tahun anggaran. Tahun 2000 mencapai realisasi sebesar 98,8 % dari target yang ditetapkan, tahun 2001 mencapai 109,9 %, tahun 2002 mencapai 109,2 %, tahun 2003 mencapai 107,1 %, dan sampai dengan tahun 2004 sudah mencapai 153,1 % dari target. Adapun pertumbuhan realisasinya selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 46,66 %. Pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 101,22 %, tahun 2002 naik sebesar 13,84 % dan tahun 2003 naik sebesar 24,92 %. Selama lima tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 45,19 %, Adapun rincian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 41,15%. Adapun penerimaan

pajak daerah yang menonjol antara lain adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Selengkapnya penerimaan dari sektor pajak daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel II.7
Perkembangan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah

No	PAJAK DAERAH	TAHUN				
		2000	2001	2002	2002	2004
1	Pajak Hotel	6,934,049,600	10,215,198,195	12,256,631,082	14,348,863,722	15,183,080,997
2	Pajak Restoran	4,433,085,117	8,163,524,297	10,412,975,016	11,999,588,464	13,144,048,368
3	Pajak Hiburan	1,638,296,190	2,230,346,165	3,015,179,493	3,575,450,492	3,635,117,767
4	Pajak Reklame	1,366,478,297	2,517,341,497	3,867,505,368	7,984,782,500	9,754,020,625
5	Pajak Penerangan Jalan	14,305,285,131	24,305,299,845	35,645,446,807	42,914,885,509	50,549,488,287
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian	2,763,156	30,096,348	74,003,700	80,820,024	80,206,684
7	Golongan C					
8	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	1,258,317,385	1,617,571,886	0	0	-
9	Pajak Parkir	0	0	1,228,140,314	1,572,090,058	1,828,226,730
	JUMLAH	29,938,274,876	49,079,378,233	66,499,881,780	82,476,480,769	94,174,189,458

Sumber : DPKD Kota Semarang

Penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 44,08%. Adapun penerimaan retribusi daerah yang menonjol antara lain adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Cetak Peta, Retribusi IMB, Retribusi Ijin Gangguan HO dan Retribusi Trayek. Selengkapnya penerimaan dari sektor pajak daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel II.8
Perkembangan Pendapatan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah

NO	RETRIBUSI DAERAH	TAHUN				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,337,345,127	6,103,894,228	8,110,826,185	10,178,567,869	11,637,570,575
2	Retribusi Kebersihan	2,767,475,650	5,581,045,625	5,536,180,895	5,645,516,240	5,704,910,625
3	Retr. Penggantian B.Cetak KTP & Akta	794,532,500	2,256,812,500	2,416,356,500	2,279,201,000	1,389,743,000
4	Retribusi Akta Capil	0	629,650,000	852,144,500	942,005,000	960,368,000
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	11,519,375	35,267,500	44,762,500	54,950,000	86,937,500
6	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	328,784,850	388,929,175	307,286,000	304,870,000	529,158,700
7	Retribusi Pasar	2,591,229,103	3,393,106,260	3,875,633,201	4,238,650,882	4,598,590,661
8	Retribusi Pengujian Kend. Bermotor	0	1,359,020,000	2,238,343,000	2,640,918,122	2,935,102,680

NO	RETRIBUSI DAERAH	TAHUN				
		2000	2001	2002	2003	2004
9	Retribusi Pemr. Alat Kebakaran	11,337,000	18,649,500	18,558,000	20,072,500	24,680,000
10	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1,067,774,365	1,757,332,470	2,047,966,800	2,538,224,275	3,078,457,750
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	824,982,791	1,628,127,955	1,818,934,730	2,039,936,335	963,645,936
12	Retribusi Terminal	665,388,720	411,813,350	666,322,900	560,431,500	376,652,900
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir	507,093,267	579,159,069	195,341,634	239,135,460	425,649,870
14	Retribusi Penyedotan Kakus	24,696,500	68,305,000	70,164,000	85,640,500	68,731,000
15	Retribusi Tempat Penginapan	Up	190,115,268	230,705,620	160,917,652	268,225,943
16	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	417,038,550	615,089,750	622,826,075	919,283,375	1,084,731,750
17	Retribusi IMB	1,802,960,015	1,935,329,340	4,913,702,673	5,867,853,700	7,834,976,280
18	Retribusi Ijin Gangguan	784,269,886	1,393,433,625	2,389,410,760	2,809,971,980	2,538,430,600
19	Retribusi Ijin Trayek	34,751,875	70,214,375	80,734,375	92,166,250	103,959,375
	JUMLAH	14,971,179,574	28,415,294,990	36,436,200,348	41,618,312,640	44,610,523,145

Sedangkan penerimaan laba BUMD sebelum adanya deviden BPD Jateng sebesar ± Rp. 307 juta atau 0,02 % dari total PAD mengalami kenaikan rata-rata sebesar 85,97 %. Kenaikan yang cukup fantastis ini disebabkan adanya setoran deviden dari Bank Jateng (BPD Jateng), Penerimaan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 84,06 %. Penerimaan yang berasal dari dana perimbangan, selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 43,93 %. Rincian penerimaan dana perimbangan terdiri dari Pos Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan rata-rata sebesar 66,02 %. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,15 %. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 68,81 %. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2001 mengalami penurunan DAK sebesar 92,18%, tahun 2002 dan tahun 2003 Pemerintah Kota tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Walaupun kota Semarang selama lima tahun terakhir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah rata-rata 45,19 %, namun faktor ketergantungan dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi masih cukup besar sekitar 72,47 %. Penyebab dari ketergantungan yang begitu besar adalah keterbatasan sumberdaya alam, jumlah aparatur yang begitu besar dan belum berkembangnya potensi perekonomian daerah. Jumlah aparatur yang besar menyebabkan belanja aparatur setiap tahun mencapai kurang lebih 58,75 %, dimana belanja tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Data penerimaan keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.9
Penerimaan Keuangan Daerah Kota Semarang
Tahun 2001 – 2004 Kota Semarang

NO.	URAIAN	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
A	BAG. PENDAPATAN ASLI DAERAH	85,524,461,000	106,839,455,000	122,744,935,000	155,824,656,967
	a. Pos Pajak Daerah	49,079,370,000	61,681,625,000	70,580,000,000	94,174,189,458
	b. Pos Retribusi Daerah	28,415,295,000	33,760,170,000	35,439,520,000	46,115,361,326
	c. Pos Bagian Laba BUMD	181,278,000	295,512,000	269,519,000	307,197,000
	d. Lain-lain PAD yang sah	7,848,518,000	11,102,148,000	16,455,896,000	15,227,909,183
B	BAG. DANA PERIMBANGAN	313,863,683,000	353,163,704,000	413,059,852,000	516,900,043,706
	a. Pos Bagi Hasil Pajak	54,885,695,000	84,178,344,000	103,701,492,000	195,409,274,272
	b. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	1,478,825,000	2,035,360,000	1,358,360,000	2,386,354,434
	c. Pos Dana Alokasi Umum	254,262,363,000	266,950,000,000	308,000,000,000	314,104,415,000
	d. Pos Dana Alokasi Khusus	3,236,800,000	0	0	5,000,000,000
C	BAG. LAIN - LAIN PEND. DAERAH YANG SAH	21,256,353,000	7,661,831,000	10,511,831,000	26,437,701,000
	a. Pos Lain -lain Pendapatan Daerah yang sah	21,256,353,000	7,661,831,000	10,511,831,000	26,437,701,000
	J U M L A H	420,644,497,000	467,664,990,000	546,316,618,000	699,162,401,673

Sumber : DPKD Kota Semarang

II.2.5. Belanja Daerah

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan perhitungan belanja rata-rata setiap tahunnya sebesar 50,29 %, Anggaran belanja sebelum perubahan sistem anggaran (Tahun 2000 – 2001) terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Pada tahun 2000 prosentase Perhitungan Belanja Rutin terhadap anggaran adalah sebesar 88,3 %, dan tahun 2001 sebesar 70,9 %. Sedangkan kenaikan perhitungan belanja rutin pada tahun 2001 adalah sebesar 135,76 %. Prosentase perhitungan belanja pembangunan terhadap anggaran pada tahun 2000 adalah sebesar 78,11 %, tahun 2001 sebesar 27,68 %. Sedangkan kenaikan Perhitungan Belanja Pembangunan pada tahun 2001 adalah sebesar 30,16 %.

Sedangkan rincian perhitungan anggaran belanja setelah perubahan sistem (Tahun 2002 – 2004) terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Pada tahun 2002 prosentase Perhitungan Belanja Aparatur

Daerah terhadap anggaran adalah sebesar 98,43 %, tahun 2003 sebesar 96,17 % dan sampai dengan tahun 2004 mencapai 66,94 % dari target satu tahun. Sedangkan prosentase Perhitungan Belanja Pelayanan Publik terhadap anggaran pada tahun 2002 adalah sebesar 98,80 %, tahun 2003 sebesar 82,92%.

II.2.6. Investasi

Nilai investasi PMA (Penanaman Modal Asing) pada Tahun 2001 dibandingkan Tahun 2003 mengalami kenaikan dari Rp. 7.943.000.000 menjadi Rp. 345.695.529.000. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami kenaikan dari Rp 28.175.000.000,- pada Tahun 2001 menjadi Rp 91.884.350.000,- pada Tahun 2003. Sedangkan dari daya serap tenaga kerja untuk PMA naik dari 987 orang menjadi 2.882 pada tahun 2003. Daya serap tenaga untuk PMDN meningkat dari 428 orang tahun 2001 menjadi 2.887 orang pada tahun 2003. Kenaikan investasi ini tidak lepas dari kondusifnya iklim investasi, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, letak strategis pada perlintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Jakarta - Surabaya, dan dukungan sarana prasarana yang memadai. Selengkapny perkembangan jumlah dan nilai investasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.10
Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi

Tahun	Jumlah		Nilai Investasi		Tenaga Kerja	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
2001	6	2	7.943.000.000	28.175.000.000	987	428
2002	9	4	4.895.000.000	11.826.961.000	1.498	3.314
2003	27	7	345.695.529.000	91.884.350.000	2.882	2.887

Sumber : Semarang Dalam Angka diolah

II.2.7. Pinjaman Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan sumberdaya yang cukup tinggi, terutama sumber pembiayaan, sementara pembiayaan yang tersedia baik yang berasal dari PAD, dana perimbangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah belum mencukupi.

Kekurangan pembiayaan pembangunan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satu alternatif yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pinjaman dari pihak ke tiga atau lembaga-lembaga keuangan.

Total kewajiban pinjaman Pemerintah Kota Semarang sampai dengan tahun 2005 sebesar Rp. 78,008,824,216.- yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp.

70,983,318,030.- ditambah bunga, bunga masa tenggang, biaya profesi dan administrasi serta denda sebesar Rp. 7,025,506,186. Secara rinci posisi pinjaman daerah sampai dengan tahun 2005 sebesar sebagai berikut :

Tabel II.11
Posisi Pinjaman Daerah per 31 Juli 2005

No	Uraian	Tahun Anggaran	Masa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Kewajiban	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Pinjaman Urban V Pandanaran, IBRD-RDI2408	1989/1990	20 Tahun	10,425,642,681	17,667,595,669	Bank Dunia
2	Pinjaman Urban Transport IBRD-RDI-2817	1993/1994	20 Tahun	8,301,905,454	19,478,724,794	Bank Dunia
3	Pinjaman SSUDP/P3KT	1994/1995	20 Tahun	27,181,765,895	28,262,645,679	Bank Dunia
4	Pembelian Gedung Dinas	2003	3 tahun	21.000.000.000	9,306,708,074	Bank BPD
5	Pengadaan Truck Kontainer sampah	2005	2 Tahun	4,074,000,000	3,293,150,000	PT. New Ratna Motor
	JUMLAH			70,983,318,030	78,008,824,216	

Sumber : DPKD Kota Semarang

II.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH

II.3.1. Jumlah, Perkembangan, dan Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52 %, pada tahun 2000 jumlah penduduk sebesar 1.309.667 jiwa, tahun 2001 jumlah penduduk sebesar 1.322.320 jiwa, tahun 2002 sebesar 1.350.005 jiwa, tahun 2003 sebesar 1.378.261 jiwa dan pada tahun 2004 sebesar 1.399.133 jiwa. Kenaikan pertumbuhan penduduk ini disamping karena tingkat kelahiran, juga disebabkan oleh migrasi dari daerah *hinterland* sebagai konsekuensi kota metropolitan. Tingkat kelahiran dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2,33 %, pada tahun 2000 sebesar 16.133, tahun 2001 sebesar 15.770 jiwa, tahun 2002 sebesar 16.315 jiwa, tahun 2003 17.162 jiwa dan pada tahun 2004 sebesar 17.562 Jiwa.

Tabel II.12
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang

No	Kecamatan	2001		2002		2003		2004	
		Jml Pendd.	Kpdtn	Jml Pendd.	Kpdtn	Jml Pendd.	Kpdtn	Jml Pendd.	Kpdtn
1	Mijen	37.927	659	38.843	675	40.685	707	41.675	724

No	Kecamatan	2001		2002		2003		2004	
		Jml Pendd.	Kpdtm	Jml Pendd.	Kpdtm	Jml Pendd.	Kpdtm	Jml Pendd.	Kpdtm
2	Gunungpati	57.485	1.092	58.130	1.105	59.042	1.122	60.208	1.143
3	Banyumanik	104.578	3.771	106.834	3.853	111.527	4.022	113.651	4.098
4	Gajahmungkur	57.550	5.339	58.482	5.425	59.220	5.494	59.831	5.550
5	Semarang Sltm	78.036	13.182	84.103	14.207	84.878	14.338	85.178	14.388
6	Candisari	773719	11.429	78.336	11.520	80.129	11.784	80.855	11.890
7	Tembalang	103.343	2.338	106.090	2.400	110.848	2.508	113.300	2.563
8	Pedurungan	137.784	6.650	141.695	6.839	145.001	6.998	148.555	7.170
9	Genuk	62.996	2.300	63.904	2.333	67.442	2.462	69.323	2.531
10	Gayamsari	63.142	12.004	64.104	12.187	65.310	12.416	66.416	12.627
11	Semarang Timur	81.816	11.491	84.044	11.804	83.897	11.783	83.759	11.764
12	Semarang Utara	122.736	11.188	122.929	11.206	123.353	11.245	124.273	11.328
13	Semarang Tgh	77.210	15.021	76.810	14.944	76.424	14.868	76.156	14.816
14	Semarang Barat	146.651	7.347	148.753	7.453	150.496	7.540	152.957	7.663
15	Tugu	24.145	822	24.400	830	24.668	840	25.189	857
16	Ngalian	89.202	2.232	92.548	2.315	95.341	2.385	97.807	2.447
Jumlah		1.322.320	3.559	1.350.005	3.634	1.378.261	3.710	1.399.333	3.744

Sumber : Semarang Dalam Angka

Dari data tersebut di atas persebaran penduduk tidak merata, kepadatan penduduk tertinggi berada di pusat-pusat kota yang meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Selatan, Gayamsari, Candisari, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Sedangkan wilayah Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tugu mempunyai jumlah penduduk terkecil, dengan kepadatan penduduk dibawah 1000 orang tiap km². Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan tingkat kepadatan sebesar 14.868 tiap km².

Berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS tahun 2002, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 73,6. Dengan angka tersebut Kota Semarang menduduki urutan ke 14 dari 341 kota di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Jawa Tengah menduduki urutan pertama. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator terhadap kualitas pembangunan manusia di Kota Semarang.

II.3.2. Pendidikan

Pembangunan Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi setiap perubahan dan diharapkan dapat membentuk manusia seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, mandiri, bertanggungjawab dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan

dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektif dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan angka putus sekolah. Selama lima tahun terakhir Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai berikut :

Tabel II.13
APK masing-masing Jenjang Pendidikan di Kota Semarang
Tahun 2000 – 2004 (%)

Pendidikan	Tahun 2000		Tahun 2001		Tahun 2002		Tahun 2003		Tahun 2004	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
SD/MI	105,44	82,24	102,85	85,86	101,98	83,05	103,22	82,5	100,87	81,81
SMP/MTs	96,32	73,76	91,48	68,27	93,64	66,72	94,49	69,45	92,34	67,87
SMU/SMK/MA	120,08	70,54	86,5	62,1	92,48	61,43	83,42	59,57	83,42	59,57

Sumber : Dinas Pendidikan

Sedangkan Angka Putus Sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel II.14
Angka Putus Sekolah Tahun 2000 – 2004

	Prosentase Angka Putus Sekolah		
	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/SMK/MA
Tahun 2000	0,07	0,39	0,74
Tahun 2001	0,07	0,39	0,74
Tahun 2002	0,07	0,42	0,45
Tahun 2003	0,06	0,46	0,75
Tahun 2004	0,10	0,48	0,78

II.3.3. Kesehatan

Derajat Kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang positif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan bidang kesehatan. Perubahan derajat kesehatan masyarakat antara lain didukung oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta variabel primer lainnya seperti ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen, kualitas pelayanan, dan kesadaran masyarakat serta aspek lain yang bersifat sebagai penunjang terhadap kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kota Semarang di atas angka harapan hidup tingkat Nasional sebesar 65 tahun. Pada tahun 2001 Angka Harapan Hidupnya mencapai 69 tahun, pada tahun 2002 naik menjadi 70 tahun, pada tahun 2003 turun menjadi 69,9 tahun dan pada tahun 2004 kembali menjadi 70 tahun. Dalam periode yang sama angka kematian bayi

mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,75 persen setiap tahun. Indikator lainnya adalah jumlah kasus gizi buruk, pada tahun 2001 turun sebanyak 40 kasus, dan pada tahun 2002 sampai dengan 2004 tetap tidak mengalami perubahan yakni 40 kasus.

Tabel II.15
Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk
Tahun 2001 – 2004

	Angka Harapan Hidup	Angka Kematian Bayi	Gizi Buruk
Tahun 2001	69	42/1000	0,8
Tahun 2002	70	33,45/1000	0,51
Tahun 2003	69,9	79,2/1000	0,63
Tahun 2004	70	79/1000	1,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kota

II.3.4. Ketenagakerjaan

Selama lima tahun terakhir berturut-turut penduduk usia produktif mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 0,025 %. Pada tahun 2000 sebesar 898.894 jiwa, tahun 2001 sebesar 904.331 jiwa, tahun 2002 sebesar 921.325 jiwa, tahun 2003 sebesar 952.056 jiwa. Sekitar 68,59 % penduduk kota Semarang adalah penduduk usia produktif (15 - 64) tahun dan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) sebesar 31,41 %.

Tabel II.16
Pencari Kerja dan Pengangguran

Tahun	Pencari Kerja	Pengangguran
2000	10.005	191.095
2001	11.072	162.254
2002	10.946	163.946
2003	12.437	163.946
2004	15.181	172.432

Sumber : Semarang Dalam Angka

Tabel II.17
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Tahun	Usia				Jumlah
	0 - 9	10 -14	15 - 65	65 +	
2000	252.386	121.824	898.984	36.473	1.309.667
2001	259.102	124.659	904.331	34.228	1.322.320
2002	268.071	128.403	921.325	32.206	1.350.005
2003	263.575	125.533	952.056	37.047	1.378.193
2004	267.561	127.440	966.522	37.610	1.399.133

Sumber : Semarang Dalam Angka Diolah

Dari data tersebut diketahui bahwa angka beban tanggungan tiap tahun sebesar 45,77 % yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 45,77 penduduk usia tidak produktif.

Struktur Penduduk menurut tenaga kerja dapat digambarkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2000 sebanyak 747.647 orang, tahun 2001 sebanyak 681.969 orang, tahun 2002 sebanyak 685.865 orang, tahun 2003 sebanyak 600.748 orang dan pada tahun 2004 sebanyak 609.875 orang.

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni perbandingan antara penduduk usia kerja dengan jumlah angkatan kerja, mulai tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 angka TPAK sebesar 73,48 %, tahun 2001 sebesar 66,10 %, tahun 2002 sebesar 65,40 %, tahun 2003 sebesar 61,25 % dan pada tahun 2004 sebesar 60,74 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung banyaknya penduduk usia kerja yang tiap tahun semakin meningkat.

II.3.5. Kesejahteraan Sosial

Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) . Walaupun ditengarai mereka berasal dari daerah lain tetapi pada kenyataannya mereka berada di wilayah kota Semarang dan menjadi pemandangan yang berkesan kurang baik.

Jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,21 % pertahun. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin sebesar 59.500 KK atau 238.200 jiwa atau 17% dari jumlah penduduk. Peningkatan tersebut dipicu dengan adanya kondisi perekonomian yang belum pulih seperti sebelum krisis dan adanya penduduk pendatang yang pada umumnya dari lapisan ekonomi lemah.

Tabel II.18
Perkembangan Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Semarang

Tahun	Penduduk Miskin (KK)	Pengemis	Waria	Wanita Tuna Susila	Anak jalanan dan Anak Terlantar
2000	54.155	350	125	955	1.489
2001	42.119	327	127	907	1.105
2002	44.013	340	125	915	1.635
2003	44.358	340	120	880	1.564
2004	59.550	325	127	876	966

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial di Kota Semarang merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Penanganan terhadap penyandang masalah sosial sudah dilakukan dan melibatkan banyak pihak, namun usaha tersebut secara empiris tidak menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Perkembangan fasilitas sosial yang tersedia di Kota Semarang dapat dilihat dari semakin beragamnya fasilitas sosial yang tersedia serta semakin meningkatnya keterlibatan peran masyarakat dalam penyediaan fasilitas sosial. Perkembangan fasilitas sosial yang ada di Kota Semarang meliputi Panti Jompo sebanyak 5 buah panti asuhan sebanyak 40 buah, rumah singgah sebanyak 3 buah dan yayasan sosial sebanyak 90 buah.

Tabel II.19
Perkembangan Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Singgah dan Yayasan Sosial di Kota Semarang

Tahun	Jumlah panti jompo	Jumlah panti asuhan	Jumlah rumah singgah	Yayasan Sosial
2000	5	34	5	76
2001	5	34	5	82
2002	5	34	6	86
2003	5	34	6	90
2004	5	40	3	90

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Yayasan-yayasan sosial tersebut juga memberikan pondok-pondok singgah dengan maksud untuk membantu anak dan remaja penyandang tuna wisma dan memberi fasilitas singgah, pendidikan, pelatihan, dan perlindungan.

II.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH

II.4.1. Perumahan

Kondisi rumah penduduk di Kota Semarang secara umum baik. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jenis rumah penduduk yang sudah permanen (tembok), yaitu sebesar 67,52%. Meskipun demikian, masih ada rumah yang dindingnya belum permanen, yang membutuhkan peningkatan kualitas rumah sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Data mengenai jumlah dan jenis rumah yang ada di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan rata-rata tingkat hunian sebesar 5 orang/rumah.

Tabel II.20
Banyaknya Rumah Penduduk di Kota Semarang Tahun 2004

No.	Kecamatan	Permanen	Semi Permanen	Papan	Bambu	Jumlah
1	Mijen	4.932	2.341	2.145	0	9.418
2	Gunungpati	6.804	4.942	2.878	0	14.624
3	Banyumanik	16.827	2.309	1.760	0	20.896
4	Gajah Mungkur	7.920	2.482	395	0	10.797
5	Semarang Selatan	9.176	4.576	2.119	0	15.871
6	Candisari	11.900	2.735	591	145	15.371
7	Tembalang	24.414	4.445	1.943	352	31.154
8	Pedurungan	26.020	4.320	1.275	217	31.832
9	Genuk	5.458	3.573	3.503	0	12.534
10	Gayamsari	9.988	1.810	967	129	12.894
11	Semarang Timur	9.768	6.532	1.435	0	17.735
12	Semarang Utara	14.757	6.426	5.839	0	27.022
13	Semarang Tengah	10.262	3.839	1.326	0	15.427
14	Semarang Barat	24.411	6.685	3.763	0	34.859
15	Tugu	3.075	1.224	604	61	4.964
16	Ngaliyan	15.292	4.175	2.838	0	22.305
Jumlah		201.004	62.414	33.381	904	297.703

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2004

II.4.2. Pelayanan Fasilitas Pendidikan

Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di kota Semarang baik sekolah negeri maupun swasta tercatat untuk jenjang pendidikan Dasar (SD) sebanyak 670 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 162 buah,

Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) 143 buah dan Perguruan Tinggi 59 buah.

Tabel II.21
Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang Pend.	Negeri		Swasta		Jumlah	
	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
TK	2	289	25	1240	27	1.529
SD	523	109.251	147	32.342	670	141.593
SMP	40	29.596	122	33.133	162	62.729
SMU	16	14.683	63	22.154	79	36.837
SMK	11	9.152	53	19.389	64	28.541
PT	4	42.000	55	53.821	57	95.821
Jumlah	596	162.971	465	162.079	1002	367.050

Sumber : Semarang Dalam Angka

Dari Tabel tersebut di atas nampak bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada tiap tingkatan cukup tinggi. Untuk pendidikan SLP dan SLA, jumlah sekolah swasta lebih banyak dari sekolah negeri.

Untuk daya tampung SD, sekolah swasta mampu menampung 32.342 murid, sedangkan SD negeri mampu menampung 109.251 murid atau sekitar tiga kali SD swasta. Untuk SMP jumlah murid yang ditampung swasta 33.133 murid, SMP negeri 29.596 murid sehingga yang ada di sekolah swasta lebih banyak daripada negeri. Fenomena ini lebih jelas di SMU/SMK dimana untuk swasta mampu menampung 22.239 murid sedangkan negeri 14.683 murid. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, peran serta atau partisipasi swasta semakin tinggi dalam pemenuhan pendidikan.

II.4.3. Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau ke seluruh wilayah, hal ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Semarang. Jumlah Rumah Sakit sebanyak 14 buah, Rumah Sakit Bersalin 22 buah, Puskesmas 37 buah dan Puskesmas Pembantu 34 buah.

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai ujung pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan jumlah 71 buah sehingga rata-rata tiap kecamatan dilayani oleh 4 buah, serta didukung oleh fasilitas kesehatan

lainnya memberikan gambaran bahwa pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat telah mencukupi.

Tabel II.22
Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota Semarang

No	Jenis Fasilitas	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Puskesmas	37	37	37	37	37
2.	Puskesmas Pembantu	34	34	34	34	34
3.	RS Negeri	5	5	5	6	6
4.	RS Swasta	8	8	8	8	8
5.	Klinik 24 Jam	19	37	40	44	44
6.	Rumah Bersalin	22	31	29	30	22
7.	Laboratorium Kesehatan	34	37	41	27	41
8.	Balai Pengobatan Negeri	0	0	0	0	0
9.	Balai Pengobatan Swasta	59	109	108	120	120

Sumber : Bappeda Kota Semarang

II.4.4 Jaringan Transportasi

Panjang jaringan jalan di Kota Semarang adalah 2.762,371 km. Dari panjang jaringan jalan tersebut, 59,760 km merupakan jalan nasional; 28,890 km merupakan jalan provinsi; dan 2.673,721 km merupakan jalan kabupaten/lokal. Bila dilihat dari kondisinya, 1.212,506 km berada dalam kondisi baik; 911,108 km berada dalam kondisi sedang; dan 638,754 km berada dalam kondisi rusak. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.23
Panjang Jalan di Kota Semarang Tahun 2004

Status Jalan	Panjang (km)	Kondisi		
		Baik	Sedang	Rusak
Negara	59,760	41,910	14,950	2,900
Provinsi	28,890	20,190	7,200	1,500
Kota/Lokal	2.673,721	1.150,406	888,958	634,354
Jumlah	2.762,371	1.212,506	911,108	638,754

Sumber: Kota Semarang dalam Angka

Selain jalan dan terminal sebagai sarana transportasi utama yang ada, Kota Semarang juga memiliki sarana simpul transportasi yang lain, yang termasuk lengkap yaitu stasiun, pelabuhan, dan bandara. Stasiun di Kota Semarang ada dua, yang semuanya termasuk stasiun perhentian kereta api yang besar yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol, serta kelengkapan depo perkeretaapian. Pelabuhan laut di Kota Semarang adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan internasional, adalah salah satu dari dua pelabuhan internasional yang ada di Provinsi Jawa Tengah, selain Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap. Sedangkan sarana transportasi udara dilayani oleh Pelabuhan Udara Ahmad Yani, yang merupakan bandara internasional. Terminal angkutan umum, terdiri dari terminal Terboyo, Terminal Banyumanik dan Terminal Penggaron.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi adalah belum terbentuknya sistem jaringan transportasi yang efisien, dimana masih terjadinya percampuran pelayanan transportasi regional dengan pelayanan transportasi kota serta belum adanya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan fasilitas transportasi darat (terminal), rel kereta api (stasiun), pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang efektif.

Tabel II.24
Banyaknya Kendaraan Bermotor dan Trayek Angkutan
di Kota Semarang Tahun 2004

Jenis Kendaraan / Trayek Angkutan	Jumlah
1. BUS	584
2. Truk	833
3. Colt, Taksi	1.762
4. Angkutan Kota	1.827
5. Mobil Pribadi	26.406
6. Sepeda Motor	104.777
Jenis Trayek	
1. Trayek Utama	49 buah
2. Trayek Ranting	44 buah

Sumber : Semarang Dalam Angka

II.4.5. Jaringan Air Bersih

Jumlah pelanggan air bersih (PDAM) di Kota Semarang adalah 115.165 pelanggan yang didominasi oleh pelanggan non niaga atau rumah tangga. Meskipun demikian, pengguna rata-rata terbesar adalah instansi pemerintah, pelabuhan dan sejenisnya, serta industri, dengan rata-rata pemakaian di atas 1.500 m³. Data selengkapnya mengenai jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Semarang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.25
Banyaknya Pelanggan Air Bersih PDAM di Kota Semarang Tahun 2004

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Air (m ³)
Sosial umum	1.258	541.672
Sosial Khusus	847	728.030
Warung Air	5	1.408
Rumah Tangga 1-5	109.936	26.523.520
Rumah Tangga Niaga	88	26.375
Insatansi Pemerintah 1 – 2	641	1.199.979
Lembaga Pendidikan 1 – 3	172	72.171
Niaga 1 – 6	5.153	1.170.048
Industri 1 – 3	146	196.803
Pelabuhan laut/ Udara	0	0
Terminal air	18	22.268
KU Khusus	1	604
Jumlah	118.265	30.482.878

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2004

II.4.6. Jaringan Drainase

Penanganan drainase Kota Semarang, terbagi atas dua karakteristik wilayah yaitu penanganan daerah atas dan penanganan daerah bawah. Penanganan daerah atas terbagi ke dalam beberapa pelayanan DAS, yaitu DAS Babon, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Banjir Kanal Barat, DAS Silandak/Siangker, DAS Bringin, DAS Plumbon. Sementara bagian bawah terbagi ke dalam empat sistem drainase, Sistem Drainase Semarang Timur, Sistem Drainase Semarang Tengah, sistem Drainase Semarang Barat, dan Sistem Drainase Semarang Tugu.

Permasalahan drainase yang dihadapi di Kota Semarang adalah adanya banjir kiriman yang terjadi di wilayah Hulu Gunung Ungaran, banjir

lokal dan terjadinya rob di kawasan sekitar pantai. Pembukaan lahan didaerah hulu mengakibatkan meningkatnya debit limpasan melebihi kapasitas saluran, erosi yang tinggi menyebabkan pendangkalan saluran dan sungai, serta penurunan tanah menjadi penyebab terjadinya rob.

II.4.7. Jaringan Sampah

Pengelolaan sampah di kota besar seperti Semarang semakin hari semakin kompleks dan perlu penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri dan lain lain) hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat dan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas atau Kelurahan/ Kecamatan.

Pengelolaan sampah Kota Semarang saat ini baru menjangkau 132 Kelurahan dari 177 Kelurahan yang ada di Kota Semarang dan sampah yang terangkut baru 75 % dari seluruh produksi sampah total Kota Semarang sebesar ± 4.000 m³/ hari.

Jumlah sarana prasarana persampahan yang ada pada saat kondisinya rata-rata umur teknisnya diatas lima tahun, secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.26
Jumlah sarana dan prasarana Persampahan

Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah
- Truck Hidrolik/Arm Roll	85 unit
- Dump Truck Sampah	16 unit
- Dump Truck Tanah	5 unit
- Truck Tinja	2 unit
- Creane	1 unit
- Wheel Loader	3 unit
- Swamp Dozer	1 unit
- Shovel Loader	1 Unit
- Excavator / Back Hoe	2 unit
- Kontainer Sampah	384 unit

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Semarang

II.4.8. Jaringan Listrik

Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2003 tercatat sebanyak 303.738 pelanggan, yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga, dengan rata-rata pemakaian seluruh pelanggan adalah 117.298 Kwh. Bila dilihat secara rinci, maka pemakai dengan konsumsi listrik rata-rata terbesar adalah industri, yaitu sejumlah 544.398,21 Kwh, sedangkan pemakai dengan konsumsi rata-rata terendah adalah rumah tangga, dengan konsumsi rata-rata sebesar

1.666,24 Kwh. Data mengenai jumlah pelanggan listrik PLN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.27
Banyaknya Pelanggan Listrik PLN di Kota Semarang Tahun 2004

Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung	Kwh Terjual
Sosial	5.337	36.714.545	55.003.646
Rumah Tangga	282.479	274.708.600	488.110.886
Usaha + Hotel	21.559	165.348.075	260.585.606
Industri	919	228.805.900	613.452.977
Kantor Pemerintah + Penerangan Jalan	3.290	41.114.184	77.741.113
Jumlah	313.784	746.691.304	1.365.617.666

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2004

Jangkauan pelayanan listrik secara sudah menjangkau pada seluruh wilayah kota Semarang namun belum semua bangunan rumah tangga menjadi pelanggan listrik PLN, hal ini dapat dilihat dari jumlah bangunan rumah tangga sebanyak 297.703 buah, sedangkan yang menjadi pelanggan rumah tangga sejumlah 282.579 pelanggan.

II.5. PEMERINTAHAN UMUM

II.5.1. Organisasi dan aparatur Pemerintahan

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kota Semarang didukung oleh aparatur sebanyak 15.044 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.653 orang Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL). Adapun struktur pegawai menurut Golongan secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel II.28
Data Pegawai TPHL dan PNS

DATA KEPEGAWAIAN	JUMLAH / TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
2. Data TPHL						
- SK perjanjian kontrak		1919	1925	1990	2804	2.653
- SK penugasan kembali		1919	1895	1913	1884	
- SK pemberhentian		24	39	106	61	
- SK penugasan baru		-	57	77	920	
3. Data Jumlah Pegawai :						
- Golongan IV/a – IV/d	61	1582	1845	3070	3057	3599
- Golongan III/a – III/d	1988	9135	9571	8191	8394	7788
- Golongan II/a – II/d	3228	4323	4143	3738	3786	3225
- Golongan I/a – I/d	573	980	386	240	226	154
- CPNS						278

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya unit kerja pada Pemerintah Kota Semarang didukung oleh unsur staf yang memiliki kualifikasi SDM yang cukup memadai.

Tabel II.29
Jumlah pegawai menurut pendidikannya

No.	Tingkat Pendidikan	JUMLAH / TAHUN				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	SD	987	952	891	848	741
2	SLTP	790	828	772	773	704
3	SLTA	6125	6281	5895	6012	5.451
4	Diploma (D1,D2 danD3)	3796	3866	3700	3735	3.974
5	S1	3885	3865	3830	3938	3.943
6	S2	154	153	151	157	230
7	S3	-	-	-	-	1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Dalam usaha meningkatkan kualitas SDM, telah diberikan kesempatan yang luas kepada para pegawainya untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal serta pelatihan-pelatihan. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.30
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Struktural

DIKLAT	TAHUN			
	2001	2002	2003	2004
1. Diklat Pim II	12	17	3	8
2. Diklat Pim III	71	25	11	16
3. Diklat Pim IV	280	200	80	-

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Berbagai macam jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ketrampilan teknis jabatan-jabatan tertentu. Belum banyak jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang dimiliki. Selengkapny jenis dan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel II.31
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional

DIKLAT	TAHUN			
	2001	2002	2003	2004
1. Diklat Fungsional Guru SD			80	
2. Diklat Fungsional Guru SLTP				
3. Diklat Fungsional Guru SLTA			40	

DIKLAT	TAHUN			
	2001	2002	2003	2004
4. Diklat Teknis Fungsional	101	218	160	204
5. Diklat Kepala Sekolah dan Diklat Penyusunan Karya Ilmiah			125	80
6. Diklat Pra Jabatan Gol. II	23		200	103
7. Diklat Pra Jabatan Gol. III	37	36	181	24

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang no. 1,2,3 dan 4 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT) Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari :

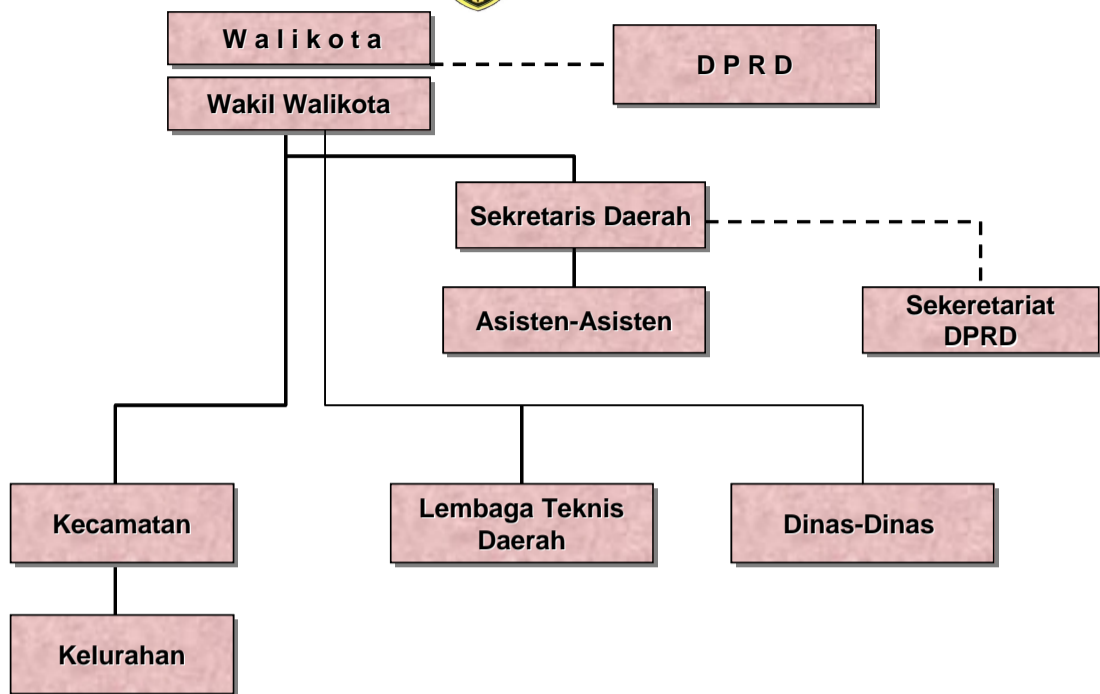
- ✚ Walikota dan Wakil Walikota.
- ✚ Sekretaris Daerah dengan 3 Asisten dan 8 Bagian yang terdiri dari
 - Asisten Tata Praja, meliputi :
 - Bagian Pemerintahan Umum
 - Bagian Pemerintahan Kelurahan
 - Bagian Hukum
 - Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - Bagian Perekonomian
 - Bagian Pembangunan
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Administrasi
 - Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
- ✚ Sekretaris DPRD dengan 3 Bagian yang meliputi :
 - Bagian Umum
 - Bagian Risalah dan Rapat
 - Bagian Keuangan
- ✚ Lembaga Teknis Daerah terdiri 6 Badan dan 4 Kantor, yang meliputi :
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Badan Pengawas Daerah
 - Badan kepegawaian Daerah
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah
 - Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah
- ✚ Dinas Daerah sebanyak 17 buah terdiri dari :
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Dinas Pendidikan
- Dinas Perhubungan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Pertanian
- Dinas Tata Kota dan Permukiman
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Pertamanan dan Pemakaman
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Pariwisata
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Kebakaran
- Dinas Kebersihan
- Dinas Pasar
- ⊕ Sedangkan yang berbentuk Kantor terdiri dari:
 - Kantor Informasi dan Komunikasi
 - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - Kantor Pengolah Data Elektronik
 - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- ⊕ Kecamatan sebanyak 16.
- ⊕ Kelurahan sebanyak 177.

Adapun struktur Organisasi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana gambar di bawah ini :



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG



II.5.2. Pelayanan Publik

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin banyaknya berbagai tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintahan yang di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat akan mampu meningkatkan citra/wibawa aparatur yang pada akhirnya akan mewujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Di samping aspek tersebut di atas, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi "entry point" yang sangat strategis dalam mengantisipasi pelaksanaan era globalisasi dalam berbagai sektor khususnya sektor perekonomian yang merupakan penggerak utama guna mewujudkan visi kota. Oleh karenanya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari administrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat – menyurat penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir yang berupa dokumen, seperti sertifikasi, perizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain.

Produk administrasi pemerintahan diantaranya adalah Pelayanan Sertifikat Tanah, Pelayanan IMB, HO, Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, Nikah Talak Cerai Rujuk(NTCR), Akte Kelahiran/Kematian), Pelayanan usaha perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan lain - lain.

Tabel II.32
Jumlah akte/ijin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang

No	Jenis Layanan	2000	2001	2002	2003	2004
1	Akte Kelahiran	20.997	19.234	21.454	22.979	23.608
2	Akte Kematian	712	690	759	759	681
3	Perkawinan	1.352	1.260	1.374	1.461	1.454
4	Perceraian	97	76	88	88	130
5	Pengakuan Anak	37	83	86	62	65
6	Pengesahan Anak	65	98	101	93	111
7	KTP	214.985	253.473	247.377	235.691	133.994
8	IMB	1.293	1.105	2.004	1.690	2.323
9	HO	484	276	474	506	425

Sumber : Semarang dalam Angka 2004

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan SPM ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan jaminan/kepastian dari pelayanan administrasi pemerintahan kepada penerima pelayanan yang meliputi standar mekanisme pelayanan, standar biaya, standar waktu penyelesaian, baik proses permintaan/pengajuan atau pengusulan maupun proses pengaduan, standar produk pelayanan, standar sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan umum, standar kompetensi petugas pemberian pelayanan.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal, beberapa langkah telah dilakukan. Pertama, mengimplementasikan Bulan Layanan Publik (BLP) yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2004. Kedua, dilanjutkan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik (TP3) hingga akhir tahun 2004. Ketiga, menindak lanjuti penerapan SPM di Pemerintah Kota Semarang telah diadakan evaluasi melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya cukup baik. Keempat, pada bulan Agustus 2005 dibuat Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5). P5 ini merupakan wadah / saluran bagi masyarakat untuk mengadu / komplain, apabila masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang kurang memuaskan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang memadai dan kemandirian

keuangan daerah dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.